

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada untuk meningkatkan perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup suatu negara menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita yang sesuai dengan misi pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan bersatu berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi harus mengimplementasikan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan keahlian sumber daya manusia (SDM) dan teknologi untuk menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya saing secara nasional.

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan adanya Otonomi Daerah yang dilakukan dengan asas desentralisasi yaitu pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan nasional tersebut diharapkan agar pemerintah daerah mampu lebih mandiri dalam mengelola keuangannya untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Menurut UU No.32 Tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang mampu meningkatkan partisipatif masyarakat, karena pada dasarnya terdapat 3 misi utama terkait pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi (Mardismo, 2004:58) yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kuantitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu mengelola secara efektif dan efisien keuangan daerahnya, agar ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat diminimalisir. Untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus meningkatkan PAD di wilayah pemerintah tersebut sebagai sumber kekuatan utama.

Djaenuri, (2012) menyatakan bahwa;

PAD ialah sebuah ukuran dari tingkat kemajuan suatu daerah otonom dalam melaksanakan kegiatan administrasi di bidang pemerintahan serta pembangunan. Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang didapatkan oleh sebuah daerah dari berbagai macam sumber pendanaaan dalam wilayahnya serta bertanggung jawab dengan hukum yang berlaku.

Abdullah, dkk (2015) menjelaskan bahwa;

Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kemandirian sebuah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya, bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka semakin kecil juga tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemberian dari pemerintah pusat begitu juga sebaliknya dikatakan sebuah daerah belum optimal atau kurang mandiri apabila kontribusi PAD yang diberikan terhadap struktur APBD masih kecil, sehingga tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat masih sangat diperlukan. Setiap daerah berusaha meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meningkatkan pendapatan pajak daerah dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.

Pemerintah Daerah menilai tingkat kemandirian suatu daerah dibidang keuangan dilihat dari rasio perbandingan PAD terhadap total Pendapatan Daerah. PAD saat ini masih menjadi sumber kekuatan utama penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, namun hingga saat ini di Indonesia kontribusi yang diberikan PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah atau belum optimal jika dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Martini,Zaliah,& Winarko (2018) yang berjudul Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kontribusi Retribusi Pasar menjelaskan bahwa Kemampuan Provinsi Sumatera Selatan dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah relatif cukup baik. Hal ini tercermin oleh perkembangan peranan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013-2015 yang terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 39,35%. Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah jika di dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari data realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018-2020:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi PAD 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**  
**T.A 2018 sampai T.A 2020**

*(Dalam Rupiah)*

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
		PAD	PAD	PAD
1.	Kab. Lahat	1,916,874,000,902	141,161,144,249	119,670,768,419
2.	Kab. Musi Banyuasin	3,019,699,825,934	286,594,847,516	338,792,835,000
3.	Kab. Musi Rawas	1,759,880,995,093	128,563,715,133	154,244,636,036
4.	Kab. Muara Enim	2,525,583,634,051	303,296,321,152	251,892,474,784
5.	Kab. Ogan Komering Ilir	2,224,001,831,454	195,401,652,978	290,303,807,756
6.	Kab. Ogan Komering Ulu	1,412,521,909,219	145,563,548,513	160,910,882,390
7.	Kota Palembang	3,485,882,634,350	1,081,114,690,868	1,844,718,837,000
8.	Kota Prabumulih	958,368,934,099	100,975,564,958	105,670,424,500
9.	Kota Pagar Alam	769,448,437,268	60,064,187,982	65,337,500,884
10.	Kota Lubuk Linggau	923,898,833,425	100,950,256,994	98,035,966,287
11.	Kab. Banyuasin	2,080,649,009,995	200,616,348,310	184,000,411,308
12.	Kab. Ogan Ilir	1,417,185,838,011	86,150,568,158	179,192,296,990
13.	Kab. Ogan Komering Ulu	1,627,163,554,868	99,017,727,658	107,866,678,700

	Timur			
14.	Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan	1,268,126,824,334	57,669,139,990	66,233,818,602
15.	Kab. Empat Lawang	978,617,329,498	41,672,141,481	56,561,822,055
16.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,226,434,373,054	84,794,229,883	114,458,106,968
17.	Kab. Musi Rawas Utara	922,981,792,439	37,574,950,357	56,214,544,000

Sumber : Direktorat Jendral Peimbangan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun, 2018-2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PAD di Provinsi Sumatera Selatan pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 masih menjadi provinsi yang belum mandiri dalam membiayai pembangunan nasional di daerahnya. Terlihat dari tabel 1.1 pada tahun 2018 kontribusi pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Selatan di dominasi oleh Dana Perimbangan yaitu sebesar 61%, lalu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 38,6%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 0,4%. Pada tahun anggaran 2019 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan mencapai Rp3.436.828.903.746,55 sampai pada akhir tahun 2019 dapat terealisasi sebesar Rp3.494.510.853.251,62 atau 101,68%. Jika di dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2018 yang sebesar Rp3.528.010.712.183,54 atau mengalami menurun sebesar Rp33.499.858.931 atau 0,9% dikarenakan penerimaan dari komponen pajak daerah yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) dan Pajak Rokok yang lebih rendah di dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp187.408.917.168 atau meningkat sebesar 3.36% dikarenakan kurang salur pemerintah pusat untuk tahun 2018 yang telah di bayar, dan lain-lain PAD yang sah jika dibandingkan dengan realisas penerimaan pada tahun 2018 sebesar Rp35.593.182.502,25 maka mengalami penurunan sebesar Rp14.538.380.887 atau 40,85% dikarenakan menurunnya pendapatan hibah (PDMIP pada tahun 2019). Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah di masa Pandemi Covid-19 mecapai hasil yang positif, dimana hingga saat ini Pendapatan

Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai 53% hal ini dikarenakan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan sudah memiliki kesadaran untuk membangun daerah dari sector pajak dan sector lainnya.

Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang dinilai memiliki potensi yang unggul dalam bidang investasi, baik PMDN dan PMA karena adanya persediaan bahan mentah dari berbagai macam sumber seperti, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pertambangan dan hasil penggalian dari hasil bumi, dan juga sector kehutanan yang dapat dijadikan sumber manfaat bagi devisa negara. Besar kecilnya skala penerimaan daerah sangat bergantung pada tingkat pendapatan dan ekonomi suatu daerah untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi nasional daerah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melakukan koordinasi dengan perusahaan daerah di Provinsi Sumatera Selatan untuk berpartisipasi atau menginvestasi sebagian besar dananya baik dalam sector industri maupun sector lainnya dengan tujuan dapat meningkatkan PAD di wilayah tersebut. Melalui Penanaman Modal/Invetasi dari dalam negeri dan luar negeri tersebut penerimaan daerah akan meningkat dikarenakan pajak dan retribusi daerah meningkat, hal ini tentu memberi pengaruh positif terhadap bertambahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 1.2**  
**Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN pada Kabupaten/Kota**  
**di Sumatera Selatan tahun 2016-2020**

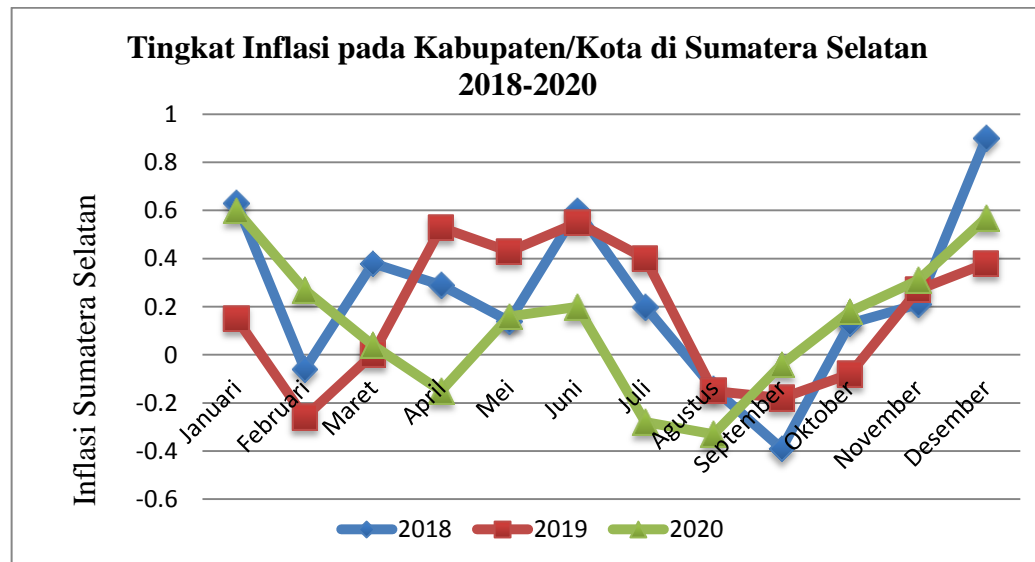
Tahun	PMDN ( Milyar Rupiah )	PMA ( Juta US\$ )
2016	8534,1	2793,5
2017	8200,2	1181,9
2018	9519,8	1078,6
2019	16921,1	736,5
2020	15824,5	1543,9

Sumber: Badan penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016-2020

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa total investasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat

lebih dari Rp 26 Trilyun dana penanaman modal yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Jumlah tersebut meningkat dibanding dengan pencapaian investasi pada tahun 2018 yang mencapai Rp 25 Trilyun. Dana ini berasal dari PMDN sekitar 60 persen, selebihnya 40 persen merupakan dana dari PMA. Namun ada keunggulan untuk tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan mendatangkan investasi senilai Rp 38 Trilyun sepanjang masa Covid-19 yang mampu melampaui target investasi dari yang ditetapkan hanya sebesar Rp 26 Trilyun.

Dengan meningkatnya kegiatan penyelenggaraan di Provinsi Sumatera Selatan akan menyebabkan Inflasi. Inflasi yaitu ketidakstabilan ekonomi yang ditandai dengan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga terhadap barang/jasa secara umum dalam waktu yang panjang. Hal ini akan memicu kondisi ekonomi yang memburuk jika tidak ada pencegahan yang dilakukan. Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2020

**Gambar 1.1**  
**Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2020 (%)**

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa laju inflasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tiap tahunnya mengalami penurunan atau melambat diakibatkan melemahnya daya beli masyarakat sedangkan jumlah komoditas

barang tetap sama hal ini cenderung membuat pengusaha akan menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan sama. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dalam Halim yang menyatakan bahwa inflasi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan seperti pajak hotel dan pajak restoran, dikarenakan jika inflasi melambat maka pengusaha akan menaikkan harga konsumsi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triani dan Kuntari (2010) menunjukkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Penelitian yang dilakukan Sari (2013) menunjukkan tingkat investasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Pande dan Agung (2014) dengan judul menyatakan hasil bahwa secara simultan tingkat Inflasi dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali. Sedangkan secara parsial tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD Provinsi Bali, namun investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2013) menyatakan hasil analisis secara simultan variabel independen yaitu tingkat inflasi dan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu PAD. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Indra, Anderson, dan Jacline (2017) yang menunjukkan hasil analisis secara parsial variabel inflasi berpengaruh positif terhadap PAD di kota Manado hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai dan harga barang/jasa yang memberikan kontribusi terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Manado.

Perbedaan hasil penelitian tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji kembali hubungan variabel independen antara tingkat inflasi dan investasi. Penelitian ini juga menggunakan variabel dependen berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan penjelasan di atas, judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh Tingkat Inflasi dan Laju Pertumbuhan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2018-2020).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pemasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2018-2020 ?
2. Apakah Laju Pertumbuhan Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2018-2020 ?
3. Apakah Tingkat Inflasi dan Laju Pertumbuhan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2018-2020 ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya dengan berfokus kepada salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Investasi dan Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2020. Peneliti juga membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian hanya pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2018-2020.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas,maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh laju pertumbuhan investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat inflasi dan laju pertumbuhan investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.



### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan langsung mengenai Pengaruh Tingkat Inflasi dan Laju Pertumbuhan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

b. Bagi Pemerintah

Untuk dapat melakukan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera selatan sehingga dapat membiayai pembangunan ekonomi daerah secara mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai permasalahan apakah Tingkat Inflasi dan Laju Pertumbuhan Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2020 dan menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Program Studi Akuntansi Sektor Publik.